Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 177-189
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20771706

Implikasi *Debt Trap Diplomacy* dalam Proyek *Belt and Road Initiative* di Sri Lanka: Analisis Perspektif Keamanan Tradisional

The Implications of Debt Trap Diplomacy in Belt and Road Initiative Projects in Sri Lanka: An Analysis from a Traditional Security Perspective

Feodor Farrel Sulistyo
Universitas Hasanuddin
Email: feodorfarrel291106@gmail.com

Abstrak

Kajian ini memperlihatkan bahwa fenomena Debt Trap Diplomacy di Sri Lanka sebagai manifestasi dari strategi economic statecraft dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI), serta implikasinya terhadap kedaulatan dan keamanan tradisional negara tersebut. Penelti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan studi kasus akuisisi Pelabuhan Hambantota, berpacu pada teori neorealisme Kenneth Waltz sebagai kerangka analitis utama, yang diperkuat oleh konsep geoekonomi dan keamanan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Tiongkok di Sri Lanka melalui mekanisme pembiayaan infrastruktur BRI secara bertahap menciptakan struktur ketergantungan ekonomi yang berujung pada penyerahan kendali Pelabuhan Hambantota melalui kontrak sewa 99 tahun kepada perusahaan milik negara Tiongkok, China Merchants Port Holdings, pada tahun 2017. Meskipun bukti empiris mengindikasikan bahwa krisis utang Sri Lanka juga bersumber dari kegagalan tata kelola domestik dan kelalaian fiskal, penyerahan kendali atas infrastruktur maritim strategis ini menghasilkan implikasi keamanan yang signifikan, baik bagi Sri Lanka maupun bagi stabilitas kawasan Samudra Hindia secara luas. Dalam perspektif neorealis, fenomena ini mencerminkan upaya sistematis Tiongkok untuk mengatasi kerentanan strategisnya melalui proyeksi kekuatan non-militer, sekaligus menunjukkan bahwa di era modern, erosi kedaulatan teritorial dapat terjadi melalui instrumen ekonomi tanpa melalui konfrontasi bersenjata.
Keywords: *Debt Trap Diplomacy*, *BRI, Pelabuhan Hambantota, Neorealisme, Keamanan Tradisional, Economic Statecraft, Kedaulatan Nasional*

Abstract

This study examines the phenomenon of Debt Trap Diplomacy in Sri Lanka as a manifestation of economic statecraft within the framework of the Belt and Road Initiative (BRI), as well as its implications for the country's sovereignty and traditional security. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach through a case study of the acquisition of Hambantota Port, drawing upon Kenneth Waltz's neorealist theory as the primary analytical framework, supplemented by the concepts of geoeconomics and traditional security.The findings indicate that China's involvement in Sri Lanka through BRI infrastructure financing mechanisms gradually created a structure of economic dependency, culminating in the transfer of control over Hambantota Port through a 99-year lease agreement to the Chinese state-owned enterprise China Merchants Port Holdings in 2017. Although empirical evidence suggests that Sri Lanka's debt crisis was also driven by domestic governance failures and fiscal mismanagement, the transfer of control over this strategic maritime infrastructure has generated significant security implications, both for Sri Lanka and for the broader stability of the Indian Ocean region. From a neorealist perspective, this phenomenon reflects China's systematic efforts to address its strategic vulnerabilities through the projection of non-military power, while also demonstrating that, in the modern era, the erosion of territorial sovereignty can occur through economic instruments without the need for armed confrontation.
Keywords*: Debt Trap Diplomacy, Belt and Road Initiative (BRI), Hambantota Port, Neorealism, Traditional Security, Economic Statecraft, National Sovereignty.*

Article Info
Received date: 10 June 2026 Revised date: 15 June 2026 Accepted date: 20 June 2026

PENDAHULUAN

Secara geopolitik, Sri Lanka menempati posisi yang sangat krusial di jantung Samudra Hindia, tepat berada di sebelah tenggara daratan India. Wilayah kedaulatannya dikelilingi oleh perairan strategis yang mencakup Samudra Hindia di sisi timur, selatan, dan barat, serta dipisahkan dari wilayah India oleh Selat Palk di bagian utara. Letak geografis yang berada di persimpangan jalur maritim internasional

ini menjadikan Sri Lanka sebagai titik tumpu bagi konektivitas perdagangan global, yang menghubungkan rute pelayaran antara Asia Timur, Asia Selatan, hingga wilayah Timur Tengah dan Eropa.

Tiongkok saat ini muncul sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat penting di dunia, yang membuat pasarnya memiliki pengaruh besar terhadap arah perekonomian global (Sulistiyawan & dkk, 2024). Dinamika yang terus berkembang dan menjurus ke arah politik global saat ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok melalui inisiatif utamanya, yaitu *Belt and Road Initiative*. (Saraswati, 2019). Menurut *Green Finance & Development Center*, *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan fokus utama Tiongkok dalam strategi kerja sama internasional dan pembangunan ekonomi, yang juga dikenal sebagai "One Belt One Road" (WANG, 2021).

Ambisi ini menunjukkan bagaimana Tiongkok bertujuan menggunakan strategi *economic statecraft* untuk membentuk kembali konektivitas global melalui pengembangan infrastruktur lintas batas. (FRATIWI, 2025). Sebagai alat kebijakan luar negeri, BRI merupakan bagian dari "diplomasi periferi" Tiongkok. Sejak 2014, "periferi" Tiongkok atau negara-negara tetangga secara resmi menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Tiongkok, yang mencerminkan hubungan yang semakin sulit dengan negara-negara besar lainnya. Karena persepsi ancaman terkait AS semakin meningkat, Tiongkok beralih ke penguatan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangganya (KALLIO, 2022). Strategi ini dijalankan bukan melalui konfrontasi militer konvensional, tetapi melalui integrasi ekonomi yang mendalam, dengan BRI sebagai kendaraan utamanya.

Diplomasi periferi dalam sejarah Asia digambarkan sebagai strategi yang digunakan oleh otoritas pusat untuk mengelola wilayah perbatasan dengan karakteristik budaya dan politik yang berbeda tanpa menggunakan asimilasi paksa. Di Kekaisaran Qing, wilayah "Asia Dalam" seperti Mongolia, Tibet, dan Xinjiang dikelola melalui sistem pemerintahan tidak langsung yang mengakui identitas lokal. Hal ini dilakukan melalui lembaga khusus yang disebut Lifan Yuan, yang bertugas mengelola wilayah-wilayah ini secara terpisah dari birokrasi inti Tiongkok. Di wilayah-wilayah ini, loyalitas penduduk tidak didasarkan pada identitas nasional Tiongkok, melainkan pada ikatan pribadi dan keagamaan kepada Kaisar Manchu, yang memposisikan dirinya sebagai pelindung Buddhisme Tibet (Ryo Sahashi, 2024).

Dalam perspektif yang lebih luas lagi, penggunaan identitas keagamaan sebagai alat integrasi politik ini mencerminkan mekanisme tata kelola ekonomi negara, di mana kekuasaan pusat berupaya meminimalkan biaya administrasi dan kontrol di wilayah periferi melalui otoritas moral dan simbolis. Sederhananya, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep *economic statecraft*. David A. Baldwin (1985) dan William J. Norris (2016) menjelaskan bahwa *economic statecraft* adalah cara suatu negara menggunakan instrumen ekonomi seperti perdagangan, investasi, bantuan, atau sanksi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri (Elvira Nuraini, 2025).

Dalam praktik diplomasi kontemporer, instrumen seperti bantuan luar negeri, aktivitas perdagangan, serta regulasi yang mengatur arus modal internasional merupakan alat yang paling umum digunakan dalam kerangka *economic statecraft* (Baldwin, 2020). Dalam praktiknya, keberhasilan *economic statecraft* sering kali menciptakan perbedaan kekuatan yang besar antara negara yang memberikan invesitasi dan yang menerima. Perbedaan ini bisa berubah menjadi sebuah jebakan yang strategis. Ketergantungan ekonomi suatu negara yang kuat, memaksa negara yang menerima investasi tersebut untuk mengikuti arah politik atau keamanan negara yang memberikan investasi. Hal ini dilakukan karena untuk menghindari sanksi atau kerugian skala besar.

Dalam mengamati kondisi keamanan global saat ini, peneliti melihat bahwa terdapat fenomena *strategic entrapment* (Ghiretti, 2025). Peneliti menemukan bahwa dilema ini bukan hanya masalah angka ketergantungan keuangan yang kaku. Lebih dari itu, peneliti mengidentifikasi situasi yang lebih dalam dan lebih mengkhawatirkan: negara-negara penerima modal secara bertahap kehilangan otonomi strategis mereka karena kewajiban yang tidak lagi proporsional dengan kapasitas domestik mereka.

Pada tahun 2007, hubungan antar Sri Lanka dan Tiongkok mengalami peningkatan tepat setelah Tiongkok mengunjungi Sri Lanka dalam rangka merayakan hubungan diplomatik. Dengan ini, kedua negara tersebut melakukan kerja sama dan ditanda tangani dalam *Memorandum of Understanding* (Ananda, 2023). Salah satu kebijakan BRI yang diberikan oleh Tiongkok ke Sri Lanka yakni bantuan proyek pelabuhan. Dapat di perhatikan bahwa posisi strategis Sri Lanka terletak di jalur perdagangan maritim utama antara Timur Tengah dan juga Asia Timur, yang menjadikannya negara ini titik fokus penting dalam strategi geopolitik dan ekonomi berbagai negara besar terutama Tiongkok.

Pada Mei 2022, Sri Lanka menyatakan kebangkrutan, menjerumuskan negara itu ke dalam krisis parah yang menyebabkan warga turun ke jalan untuk melakukan protes. Gelombang ketidaksetujuan publik ini memuncak pada penggulingan Gotabaya Rajapaksa, Presiden kedelapan Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka . Pada saat itu, total utang negara diperkirakan mencapai $82 miliar, dengan sekitar 10% di antaranya terutang kepada China (Justice, 2024). Tiongkok tetap memberikan pinjaman kepada Sri Lanka meskipun kondisi keuangan negara itu sudah sangat tertekan dan kesulitan untuk membayar utang-utangnya.

Situasi ini tidak semata-mata disebabkan oleh minimnya pemasukan dari Pelabuhan Hambantota, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan internal Sri Lanka sendiri, terutama ketidakstabilan ekonomi dan politik setelah perang sipil yang berlangsung hampir tiga dekade (Hasanah & dkk, 2022). Hal ini yang memunculkan fenomena *Debt Trap Diplomacy* di wilayah Sri Lanka dan merupakan bagian dari instrumen operasional *strategic entrapment.*

Analisis terhadap fenomena *Debt Trap Diplomacy* di Sri Lanka memerlukan kajian kritis yang menyeimbangkan ambisi geopolitik Tiongkok dengan dinamika politik domestik Sri Lanka. Istilah *Debt Trap Diplomacy* pertama kali dicetuskan oleh akademisi India, Brahma Chellaney dalam sebuah opini yang ia tulis untuk Project Syndicate pada Januari 2017. Gagasan ini didasarkan pada strategi geopolitik yang disebut *Belt and Road Initiative* yang diumumkan oleh Tiongkok pada tahun 2013, di mana satu negara memberikan pinjaman kepada negara lain di bidang yang diminati oleh negara pemberi pinjaman, dan negara pemberi pinjaman memberikan pengaruh yang berlebihan pada negara penerima, sehingga negara penerima terlilit utang dan akhirnya berada di bawah kendali negara pemberi pinjaman.

Gagasan ini telah dikembangkan menjadi penjelasan umum tentang pembiayaan infrastruktur di negara-negara berkembang oleh Tiongkok dan telah dimasukkan dalam studi kasus tentang akuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Menariknya, melalui narasi kebijakan luar negeri resmi Tiongkok, secara konsisten membingkai BRI sebagai inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan negara-negara mitranya (Safitri, Ginanjar, & Nastiti, 2025) sebuah klaim yang pada dasarnya sejalan dengan makna diplomasi, yang umumnya bersifat timbal balik dan kooperatif. Konsep ini kemudian banyak digunakan sebagai referensi untuk menjelaskan pola pembiayaan infrastruktur Tiongkok untuk negara-negara berkembang, termasuk dalam studi kasus akuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.

Melalui proyek BRI tentunya menimbulkan sisi positif dan sisi negatif bagi Sri Lanka, khususnya geopolitik dari Sri Lanka (Ariyawardana, 2022). Stabilitas geopolitik suatu negara dapat dilihat dari bagaimana suatu negara dapat menjaga kedaulatan wilayahnya. Akan tetapi negara yang sudah sejak awal berada dalam kondisi yang rentan dengan beban utang yang besar kian rentan terhadap dinamika geopolitik, berujung pada menurunnya arus invetasi, meningkatnya biaya dan melemahnya perekonomian domestik (Imawan & dkk, 2025).

Kondisi kerentanan ini yang membawa fokus penelitian ini kepada diskursus yang lebih mendalam mengenai *Debt Trap Diplomacy.* seperti kasus Sri Lanka yakni pelabuhan hambantota ataupun pinjaman dengan persyaratan yang terlalu berat bagi negara peminjam untuk dibayar kembali, yang pada akhirnya memaksa mereka untuk menerima konsesi ekonomi atau politik. Sri Lanka merepresentasikan manifestasi paling nyata dari negara yang mengalami *debt trap* di kawasan Asia Pasifik. Melalui ambisi modernisasi infrastruktur pasca-konflik, Dalam upayanya memacu

pembangunan pasca-konflik, Sri Lanka justru terperosok ke dalam ketergantungan modal eksternal yang sangat masif, terutama untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur raksasa yang secara komersial sebenarnya kurang layak (Gopaldas, 2018). Ironisnya, meskipun proyek-proyek ini memiliki nilai ekonomi yang rendah, mereka justru menyimpan nilai geopolitik yang sangat tinggi bagi pihak luar.

Kondisi Sri Lanka sebagai negara yang terjebak semakin terlihat jelas saat tumpukan utang luar negerinya mulai melaju jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasionalnya. Keterjebakan tersebut kemudian membuka ruang bagi beroperasinya *debt-trap diplomacy* (Lakshmi, 2021). Dalam sebuah kajian yang dimuat oleh The Geopolitics, istilah *Debt-trap Diplomacy* digunakan untuk menggambarkan bagaimana praktik penyaluran pinjaman oleh suatu negara kepada negara lain dengan tujuan untuk memperluas pengaruh politik.

Pola ini biasanya ditandai dengan penawaran proyek atau skema pembiayaan yang disertai persyaratan berat, sehingga menyulitkan negara penerima dalam memenuhi kewajiban pembayaran (Ajnoti, 2022). Dalam kondisi tersebut, negara peminjam berpotensi terdorong untuk memberikan konsesi ekonomi maupun politik. Secara sederhana, jebakan utang merepresentasikan situasi ketika suatu pihak harus menambah pinjaman baru untuk menutup kewajiban utang yang telah ada. Ketika Sri Lanka mencapai titik gagal bayar sebagaimana tercatat dalam laporan IMF bahwa utang publik diproyeksikan mencapai 95% dari PDB, negara tersebut kehilangan kemampuan untuk melakukan penolakan strategis terhadap tuntutan krediturnya (IMF, 2025).

Peneliti memilih Sri Lanka sebagai fokus penelitian didasarkan pada posisi uniknya sebagai "titik uji" bagi efektivitas strategi *economic statecraft* di kawasan Samudra Hindia. Urgensi penelitian ini terletak pada fakta bahwa Sri Lanka merupakan preseden nyata di mana instrumen ekonomi non-militer mampu menghasilkan penguasaan fisik atas aset strategis nasional. Pelabuhan Hambantota bukan sekadar infrastruktur komersial; ia adalah aset geopolitik yang terletak hanya sepuluh mil laut dari jalur pelayaran energi utama dunia (MIAP, 2026).

Fenomena di Sri Lanka menjadi disimpulkan menjadi sebuah urgensi untuk ditelaah lebih dalam lagi karena terdapat pergeseran dalam ancaman terhadap integritas teritorial. Pada tahun 2017, Sri Lanka menunjukkan bahwa kontrak selama 99 tahun dapat menjadi alat yang jauh lebih efektif untuk membangun pengaruh fisik asing di wilayah-wilayah strategis (Lakshmi, 2021). Dalam lingkup keamanan tradisional itu sendiri, dapat didefinisikan bahwa suatu negara wajib melindungi intergritas teritorialnya. Ketika suatu entitas asing memperoleh otoritas administratif dan fisik atas sektor utama suatu negara melalui mekanisme utang, hal ini secara efektif melemahkan inti dari keamanan tradisional (Institute, 2024).

Kajian akademis terhadap kasus Pelabuhan Hambantota telah berkembang dari berbagai sudut pandang yang ada. Namun secara konsisten lagi, masih ada celah analisis yang sama. Nurjayanti (2020) dalam jurnal *Nation State: Journal of International Studies* menempatkan Tiongkok sebagai negara pusat sementara Sri Lanka sebagai negara pinggiran karena krisis Hambantota merupakan akibat dari kegagalan dalam pengelolaan ekonomi dan politik lokal. Kesimpulan ini berhenti pada tingkat pengelolaan urusan negara yang patologis tanpa memeriksa bagaimana tata kelola ekonomi Tiongkok secara sistematis telah menggeser status infrastruktur fisik di Sri Lanka.

Mustikasari (2021) dalam *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* (2021) berjudul "Motif Ekonomi Politik Sri Lanka: Kegagalan Mahinda Rajapaksa dalam Proyek Pelabuhan Hambantota" menjelaskan secara mendalam dimensi internal ini dengan menggunakan teori konstruktivis dan loan push theory, tetapi analisis Mustikasari tidak secara sistematis memecahkan tranisi kekuasaan material ke infrastruktur kritis secara jangka panjang. Seperti halnya Nurjayanti, analisis Mustikasari juga tidak secara sistematis memecahkan tranisi kekuasaan material ke infrastruktur kritis secara jangka panjang.

Penelitian ini hadir dan bertujuan untuk membahas kegagalan Sri Lanka tidak hanya dalam melunasi utang luar negerinya, tetapi juga ancaman jebakan utang terhadap kedaulatan nasional suatu

negara. Selain itu, penelitian ini menyelidiki dampak ketergantungan keuangan yang akut yang dapat membatasi ruang gerak diplomatik dan otonomi strategis negara penerima, sehingga menimbulkan kerentanan yang berkaitan dengan kedaulatan teritorial. Studi berikut ini mengkaji, dari sudut pandang keamanan tradisional, sejauh mana kendali atas aset infrastruktur strategis akan diserahkan kepada kekuatan asing. Para aktor tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk merongrong integritas nasional, dan. sebagai perubahan dalam cara kerja dalam perebutan posisi geopolitik di kawasan Samudra Hindia. Hal ini membuat masalah utang menjadi lebih serius dan menjadikannya lebih sebagai masalah keamanan tradisional. Begitu suatu negara menyerahkan kendali atas aset tersebut, yang bisa berupa pelabuhan, aset itu tidak lagi menjadi aset kritis negara tersebut. Pelabuhan Hambantota, yang telah disewakan selama 99 tahun sebagai imbalan atas pengampunan utang, merupakan ilustrasi nyata dari ancaman terhadap kedaulatan suatu negara.

Ini merupakan analisis mendalam mengenai fenomena *Debt Trap Diplomacy* Tiongkok di Sri Lanka sebagai alat diplomasi ekonomi yang tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi negara tersebut, tetapi juga menimbulkan ancaman nyata terhadap kedaulatan dan keamanan tradisional negara tersebut di kawasan Asia Selatan. Teori hubungan internasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah Neo-realisme karya Kenneth Waltz. Dalam aspek ekonomi, instrumen yang digunakan adalah bantuan dan pinjaman infrastruktur melalui *Belt & Road Initiative* (BRI), yang dianggap sebagai proyeksi kekuatan Tiongkok (*power projection*) untuk mengubah keseimbangan kekuatan. Dalam aspek ekonomi, Tiongkok telah menganggap alat-alat tersebut sebagai bantuan dan pendanaan infrastruktur melalui Belt & Road Initiative (BRI) sebagai proyeksi kekuatan Tiongkok (*power projection*) untuk mengubah keseimbangan kekuatan. (Akbar, 2024).

Dalam perspektif neo-realisme, fenomena ini bukan sekadar kegagalan manajemen fiskal, melainkan manifestasi dari upaya kekuatan besar untuk mengamankan kepentingan strategisnya dalam sistem internasional yang anarkis (Akbar, 2024). Menurut teori-teori neorealis seperti yang dikemukakan oleh Kenneth Waltz, negara-negara akan selalu berupaya meningkatkan kemampuannya demi kelangsungan hidupnya. Tiongkok telah menerapkan strategi ekonomi sebagai cara untuk mengembangkan tingkat ketergantungan yang tinggi, namun tanpa menggunakan kekerasan dalam kasus Sri Lanka. Ini merupakan langkah cerdas bagi Tiongkok karena dapat memperoleh pengaruh yang besar di Sri Lanka tanpa harus membayar harga perang. Dengan demikian, pengaruh Sri Lanka dapat ditingkatkan dan hal ini juga akan memperkuat pengaruh Tiongkok di Sri Lanka.

Meskipun akar masalahnya terletak pada kelalaian manajemen domestik, Tiongkok memiliki kesempatan untuk memperkuat kehadirannya di Samudra Hindia. Tiongkok memanfaatkan sistem keuangan sebagai alat kebijakan luar negeri untuk memperoleh manfaat strategis bagi Sri Lanka dalam krisis utang guna melunasi utang. Sri Lanka menghadapi kesulitan dalam melunasi utangnya, dan Tiongkok menggunakan sistem keuangan sebagai senjata kebijakan luar negeri untuk memperoleh manfaat strategis bagi Sri Lanka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diplomasi modern, alat-alat ekonomi seperti bantuan dan pengendalian aliran modal dapat berujung pada pengendalian fisik atas wilayah-wilayah strategis. Oleh karena itu, studi ini akan membantu memahami mekanisme diplomasi jebakan utang dalam konteks persaingan global sebagai strategi kunci. Penelitian ini juga memberikan wawasan berharga mengenai masa depan otonomi strategis negara-negara kecil dalam konteks kekuatan besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang difokuskan pada studi kasus tunggal mengenai akuisisi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024). Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah analisis mendalam terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi dalam proses akuisisi Pelabuhan Hambantota. Dengan menggunakan

pendekatan studi kasus ini, peneliti dapat menelusuri secara rinci kronologi proses akumulasi utang, sifat kontrak investasi, serta perubahan-perubahan yang saling terkait dalam kebijakan luar negeri Sri Lanka. Analisis ini lebih komprehensif dan spesifik dalam hal mekanisme kekuasaan negara di dalam sistem internasional.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori utama yaitu Neorealisme atau Realisme Struktural. Konsep ini diperkuat lebih lanjut oleh Geoekonomi dan Realisme Neoklasik. Sistem internasional bebas dari otoritas pusat apa pun, menurut buku Kenneth Waltz berjudul *The Theory of International Politics*. Dilihat dari sudut pandang ini, negara adalah aktor rasional dengan tujuan tunggal untuk bertahan hidup. Neorealisme berbeda dari realisme klasik karena mengambil struktur sistem internasional sebagai titik awalnya: Tindakan negara ditentukan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan mengembangkan kapabilitasnya (Amaritasari, 2015). Dalam konteks ini, keterlibatan Tiongkok di Sri Lanka dipandang sebagai tindakan rasional yang dilakukan oleh sebuah negara adidaya untuk mengamankan posisi strategis guna menyeimbangkan pengaruh negara-negara adidaya lain (balancing) di kawasan Samudra Hindia.

Dalam penelitian ini, konsep keamanan tradisional diadopsi sebagai kerangka untuk mengkaji implikasi strategis dari akuisisi Pelabuhan Hambantota. Berbeda dengan pendekatan modern terhadap keamanan yang mempertimbangkan berbagai isu, keamanan tradisional memiliki fokus yang lebih sempit pada ancaman terhadap kedaulatan teritorial dan nasional. Hal ini disebabkan oleh negara yang tetap menjadi aktor utama dalam sistem internasional yang belum memiliki pemerintahan sendiri. Bagaimana dominasi aset strategis oleh pihak asing dapat membuat suatu negara rentan terhadap kehilangan otonomi menjadi topik analisis ini. Dengan melihat konsep keamanan tradisional ini, peneliti dapat melihat bahwa proyek BRI tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, melainkan juga dengan kekuatan militer dan keseimbangan kekuatan.

Menurut neorealis, kehilangan kendali atas wilayah darat dan infrastruktur dapat menimbulkan ancaman langsung terhadap kelangsungan hidup suatu negara. Oleh karena itu, keamanan tradisional menjadi parameter dalam penelitian ini untuk menilai sejauh mana ancaman krisis keuangan dapat berubah menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan kendali strategis Sri Lanka di kawasan Samudra Hindia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implikasi strategis dari akuisisi Pelabuhan Hambantota terhadap keamanan dan kedaulatan Sri Lanka.

Metode pengumpulan data penelitian yakni data sekunder yang mencakup literatur ilmiah dan dokumen resmi yang kredibel serta relevan dengan rentang waktu penelitian. Kumpulan data yang dikumpulkan meliputi buku teks teori Hubungan Internasional, jurnal akademik bereputasi, dan laporan teknis dari organisasi multilateral internasional. Data dalam laporan-laporan ini merupakan data otoritatif mengenai proyeksi ekonomi dan statistik utang publik. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola hubungan, sinkronisasi fakta kronologis, dan pemaknaan konseptual. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana instrumen teknologi ekonomi dapat diubah menjadi proyeksi kekuatan strategis.

Data dikumpulkan secara teratur dan juga sistematis. Terdapat tiga tahap utama yang harus diikuti dalam proses pengumpulan data ini. Pertama, peneliti menentukan kriteria yang digunakan untuk memilih dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Peneliti melakukan pencarian secara mendetail terhadap data akademik dan situs web resmi lembaga internasional menggunakan kata kunci yang tertera. Kemudian, metode yang digunakan peneliti dalam menganalisis data ini menggunakan metode neorealisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh politik luar negeri dalam hal ini utang terhadap otonomi strategis dan keseimbangan kekuatan di suatu kawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana *Debt Trap Diplomacy* digunakan dalam persaingan hegemoni global dan menawarkan perspektif kritis terhadap masa depan otonomi strategis negara-negara kecil di bawah pengaruh kekuatan besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sri Lanka, negara yang terletak di persimpangan jalur maritim internasional, berada pada posisi yang sangat strategis, sehingga negara ini rentan terhadap kepentingan hegemoni negara-negara besar. Sejak diluncurkan pada tahun 2013 oleh Presiden Xi Jinping, BRI telah berkembang secara signifikan dan menjadikannya salah satu proyek infrastruktur ambisius dalam sejarah modern, dimana mencakup lebih dari dua pertiga populasi global dan tiga perempat cadangan energi dunia. (Anam & Ristiyani, 2021). Namun, di balik narasi konektivitas dan kerja sama ini, proyek BRI semakin dipandang sebagai perwujudan dari kepentingan ekonomi Tiongkok, di mana kekuatan ekonomi dimobilisasi secara sistematis untuk mendapatkan kepentingan yang strategis dalam kebijakan luar negeri.

Konsep "*economi statecraft*" merujuk pada tindakan kebijakan suatu negara yang terorganisir yang berusaha untuk memengaruhi lingkungan eksternal negara atau kebijakan negara lain dengan menggunakan sumber daya ekonomi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pembuat kebijakan (Kostecka-Tomaszewska & Krukowska, 2021). Dalam konteks BRI, Tiongkok meminjamkan infrastruktur lalu menyalurkan investasi ke negara peminjam dan mengembangkan fasilitas pelabuhan sebagai sarana untuk memperluas eksternal geopolitiknya, terutama di kawasan Samudra Hindia yang terbilang cukup strategis. BRI merupakan salah satu pendekatan utama dari strategi ekonomi baru Tiongkok, dimana melalui strategi ini dapat mendorong hubungan perdagangan, investasi, dan juga pinjaman yang lebih dalam yang terkait dengan keterlibatan politik yang semakin erat, terutama antara Tiongkok dan negara-negara berkembang (USIP, 2023).

Keterlibatan Tiongkok di Sri Lanka dimulai jauh sebelum BRI diluncurkan secara resmi. Pembangunan Pelabuhan Hambantota, yang terletak di pantai selatan Sri Lanka, dimulai pada tahun 2008 atas inisiatif Presiden Mahinda Rajapaksa, yang sedang mencari pendanaan untuk pembangunan infrastruktur pasca-perang saudara. Pembangunan tersebut dilakukan sebelum BRI dan sebagaimana ditunjukkan oleh Moramudali dan Panduwawala (2024) dalam studi akademiknya. Hal tersebut merupakan hasil dari insentif elektoral yang kuat di dalam negeri, bukan hanya BRI Tiongkok.

Diluar aspek proyek itu sendiri, Tiongkok menciptakan struktur ketergantungan sistematis melalui model pembiayaan yang digunakan, yang dikelola oleh Exim Bank of China. Pinjaman yang disediakan oleh lembaga keuangan milik Tiongkok memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau ADB, dan akan menjadi beban fiskal jangka panjang bagi Kolombo. Sri Lanka memiliki utang luar negeri sebesar USD 26,4 miliar, di mana USD 7,1 miliar di antaranya adalah utang kepada Tiongkok. (Vivekananda International Foundation, 2022). Konsep *Debt Trap Diplomacy* oleh Tiongkok berkisar pada tuduhan bahwa Tiongkok secara sengaja meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada negara-negara dengan suku bunga tinggi dan kemudian memaksa mereka untuk melunasinya dengan menyerahkan aset-aset strategis, sebuah praktik yang menjadi inti dari pembahasan ini.

Dari sudut pandang neorealisme, sikap Tiongkok dalam kerangka BRI dapat ditafsirkan sebagai strategi yang dirancang secara sistematis untuk mengatasi kerentanan strategis yang dikenal sebagai "*Malacca Dilemma*", di mana kekuatan angkatan laut barat berpotensi untuk memblokir jalur pelayaran Tiongkok melalui Selat Malaka. Secara bertahap, Tiongkok telah mengembangkan strategi "*Pearl of String*" serangkaian fasilitas maritim strategis di sepanjang Samudra Hindia, termasuk di Hambantota. Meningkatnya kehadiran angkatan laut Tiongkok di pelabuhan-pelabuhan kunci seperti Gwadar dan Hambantota sedang memulihkan keseimbangan kekuatan dari Selat Malaka ke Selat Hormuz. (Mallick, 2024) secara mendasar membalikkan keseimbangan kekuatan tradisional di kawasan Samudra Hindia.

Oleh karena itu, proyek BRI memiliki dua dimensi yang tak terpisahkan: di satu sisi, proyek ini menawarkan insentif pembangunan infrastruktur yang konkret bagi negara-negara berkembang; di sisi lain, ia secara bersamaan membangun jaringan ketergantungan ekonomi yang memberikan pengaruh geopolitik yang signifikan bagi Tiongkok. BRI dapat memberikan Tiongkok tidak hanya kesempatan untuk mengamankan rantai pasokannya dan akses pasar, tetapi juga untuk memperkuat soft power-nya

dan membangun jaringan negara-negara yang saling terhubung dan otonom. (Kostecka-Tomaszewska dan Krukowska 2021)

Sri Lanka telah dilanda krisis keuangan sejak 2017 dan terpaksa mengambil salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarahnya. Pada Desember 2017, pemerintah Sri Lanka menandatangani kontrak berdurasi 99 tahun untuk mengoperasikan Pelabuhan Hambantota dengan sebuah perusahaan Tiongkok bernama China Merchants Port Holdings (CM Port) sebagai imbalan atas investasi sebesar 1,12 miliar dolar AS di pelabuhan tersebut. Berdasarkan perjanjian tersebut, CM Port akan memegang 85% saham dalam operasional pelabuhan dan memiliki hak pengelolaan eksklusif atas lebih dari 15.000 hektar zona ekonomi khusus (SEZ) di sekitarnya. (Vivekananda International Foundation, 2022).

Insiden ini menarik perhatian signifikan di kalangan pemerintah dan pembuat kebijakan di Tiongkok terkait *Debt Trap Diplomacy* negara tersebut. Beberapa ahli memandang kebijakan yang disengaja Beijing sebagai alat paling eksplisit yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok, yang melibatkan pemberian pinjaman dengan pemahaman eksplisit bahwa pinjaman tersebut tidak akan dilunasi, diikuti dengan penyitaan aset-aset strategis vital, sebagaimana dijelaskan oleh (Himmer dkk, 2023). Hal ini sejalan dengan fakta bahwa pelabuhan tersebut terletak di salah satu rute pelayaran internasional tersibuk di dunia dan memiliki arti penting yang signifikan bagi sektor militer dan intelijen.

Namun, pemeriksaan lebih mendalam terhadap bukti empiris mengungkapkan gambaran yang lebih nuansatif. Menurut Moramudali dan Panduwawala (2024), penyewaan Pelabuhan Hambantota kepada Tiongkok bukanlah pertukaran utang dengan ekuitas, melainkan langkah jangka pendek untuk mengatasi tekanan likuiditas valuta asing dan defisit fiskal, sebagai respons terhadap kerentanan ekonomi eksternal Sri Lanka. Dilihat dari sudut pandang ini, pelabuhan tersebut tidak disewakan semata-mata karena tekanan dari Tiongkok. Bagi Sri Lanka, terdapat faktor-faktor ekonomi yang berperan seperti kebutuhan untuk menghindari krisis neraca pembayaran dan kebutuhan untuk menstabilkan cadangan devisa. Bukan pihak Tiongkok yang mendekati pemerintah Colombo untuk pendanaan; justru sebaliknya. (Moramudali & Panduwawala, 2024).

Terlepas dari niat di balik Hambantota, fakta bahwa perjanjian sewa selama 99 tahun memiliki dampak nyata terhadap kedaulatan Sri Lanka tidak dapat disangkal. Penyerahan kendali atas infrastruktur maritim kritis kepada negara lain selama satu abad ke depan menciptakan preseden yang sangat serius dan menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai kedaulatan nasional. Para neorealis memiliki pandangan berbeda dimana sistem internasional yang anarkis ini memungkinkan negara-negara besar untuk mengeksploitasi kelemahan struktural negara-negara kecil. Sayangnya dalam sistem semacam itu, kedaulatan fisik suatu negara dapat diubah menjadi komoditas yang "dapat dijual" akibat ketidakmampuan negara tersebut mengatasi tantangan ekonomi domestic seperti yang terlihat di Sri Lanka.

Selain itu, istilah kendali atas wilayah dalam perjanjian sewa Hambantota dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Sri Lanka mengklaim bahwa tidak ada klausul dalam kontrak yang memungkinkan Tiongkok menggunakan pelabuhan tersebut untuk kegiatan militer, namun perusahaan milik negara Tiongkok, CM Port, memegang 85 persen saham operasional, sehingga memberikan Tiongkok keunggulan strategis yang alami. Hal ini mungkin menimbulkan kekhawatiran strategis bagi India dan AS dalam memanfaatkan aset strategis Sri Lanka, termasuk di pelabuhan Hambantota dan Colombo, kata Kandaudahewa. Secara strategis, dalam konteks keamanan tradisional, kemampuan negara asing untuk mengoperasikan infrastruktur pelabuhan strategis secara efektif secara de facto memperluas wilayah negara tuan rumah secara hukum.

Pada Agustus 2022, insiden yang melibatkan pesawat ruang angkasa Yuan Wang 5 sekali lagi mengangkat isu kedaulatan. Insiden tersebut memicu respons diplomatik yang kuat dari India dan AS terkait kekhawatiran keamanan atas kehadiran aset militer Tiongkok di fasilitas yang dikelola oleh perusahaan milik negara Tiongkok (Kandaudahewa, 2023). Larangan selama satu bulan terhadap kapal

penelitian asing yang diumumkan oleh Sri Lanka dalam upayanya untuk tetap netral di tengah persaingan geopolitik yang sedang berlangsung antara negara-negara adidaya menunjukkan betapa sulitnya bagi Colombo untuk mempertahankan otonomi strategisnya.

Situasi ini merupakan contoh utama dari salah satu prinsip inti neorealisme, yaitu bahwa hilangnya kedaulatan di dunia modern tidak selalu terwujud secara terbuka melalui invasi militer. Sebaliknya, hal itu terjadi secara bertahap dan terkadang bahkan tanpa disadari, dalam bentuk rangkaian kesepakatan ekonomi yang secara bertahap mengikis kemandirian strategis suatu negara. Integritas teritorial yang secara historis dilindungi oleh kemampuan pasukan pertahanan nasional, kini diserahkan di front ekonomi, di mana setiap perjanjian pinjaman merampas salah satu hak kedaulatan negara terkait infrastruktur strategis bernilai tinggi.

Efek domino ketidakamanan dan ketidakstabilan yang diakibatkan oleh akuisisi Pelabuhan Hambantota oleh Tiongkok telah melampaui batas hubungan bilateral antara Sri Lanka dan Tiongkok serta membentuk "efek domino" mendasar dalam tatanan keamanan secara keseluruhan di Asia Selatan. Dari sudut pandang keamanan tradisional, perubahan kendali atas infrastruktur maritim strategis yang pada dasarnya berada di jantung Samudra Hindia ini memiliki implikasi langsung terhadap perhitungan keamanan semua aktor utama di kawasan tersebut, terutama India.

Samudra Hindia bukan hanya koridor perdagangan ekonomi yang sangat penting, yang mencakup hampir 80 persen perdagangan minyak dunia dan lebih dari 60 persen perdagangan kontainer global, tetapi juga medan pertempuran geopolitik antara Tiongkok dan pihak-pihak yang berusaha membatasi pertumbuhan Beijing. India, sebagai kekuatan dominan regional di Samudra Hindia, telah lama memegang posisi hegemonik dalam keamanan Samudra Hindia. Kehadiran Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan ini merupakan bagian dari fasilitas yang terkait dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), yang membentang dari Gwadar, Pakistan hingga Hambantota, Sri Lanka, yang secara mendasar menantang kehadiran tradisional India di kawasan tersebut. (Mallick, 2024).

Dilema keamanan ini dikembangkan oleh Herz, Butterfield, dan Jervis. Memahami situasi keamanan di kawasan ini kini sangatlah penting. Tiongkok sedang menguasai pelabuhan-pelabuhan di sekitar wilayah India. New Delhi tidak yakin apakah tujuan Tiongkok bersifat komersial atau apakah ada rencana militer tersembunyi. Ada kekhawatiran terkait sifat ganda Pelabuhan Hambantota. Fasilitas sipil di sana dapat dengan mudah diubah menjadi pangkalan angkatan laut. Hal ini telah mengubah secara permanen cara pandang terhadap ancaman di kawasan tersebut. Insiden Yuan Wang 5 pada 2022 menunjukkan bahwa kekhawatiran tentang penggunaan Hambantota oleh Tiongkok untuk tujuan intelijen dan militer adalah nyata. Ini bukan sekadar spekulasi; ini adalah ancaman.

Kehadiran Tiongkok di Sri Lanka mengubah keseimbangan kekuatan. New Delhi telah lama menjadi kekuatan dominan di Asia Selatan. Menurut SAIS Review of International Affairs (2025), kini terdapat persaingan geopolitik. India, sebagai kekuatan di kawasan ini, mulai khawatir terhadap pengaruh Tiongkok yang semakin besar. India merespons dengan berbagai cara. Pada tahun 2022, India memberikan paket bantuan ekonomi senilai $4 miliar kepada Sri Lanka. Hal ini jelas bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh Tiongkok. India juga memperoleh akses ke Pelabuhan Trincomalee. Hal ini memperkuat kepentingan India di pulau tersebut. Melalui kendali atas aset-aset di Sri Lanka, Tiongkok berhasil memproyeksikan kekuatannya di laut secara efektif. Ini merupakan bagian dari strategi "String of Pearls" Tiongkok.

Tujuannya adalah membangun jaringan fasilitas. Hal ini akan memungkinkan Tiongkok untuk memproyeksikan kekuatannya jauh melampaui perairan tradisionalnya. Amineh dan Li (2025) menyatakan bahwa kekhawatiran geopolitik utama terkait proyek-proyek BRI di Samudra Hindia adalah niat Tiongkok untuk mengamankan jalur komunikasi laut. 95 persen perdagangan Tiongkok melewati jalur-jalur tersebut. Krisis ekonomi Sri Lanka pada 2022 mempercepat dinamika keamanan ini. Krisis tersebut menciptakan peluang bagi kekuatan-kekuatan untuk memperluas kehadiran mereka di Sri Lanka.

Ketidakstabilan Sri Lanka telah memungkinkan AS, Tiongkok, dan India untuk memperkuat kehadiran mereka di negara tersebut. Hal ini telah mengubah Sri Lanka menjadi medan pertempuran proxy dalam persaingan antara Tiongkok dan AS serta India. Pergeseran ini memiliki implikasi di luar Sri Lanka. Perilaku Tiongkok melalui BRI merupakan respons terhadap sistem internasional. Negara-negara yang terancam oleh ekspansi Tiongkok sedang membentuk koalisi. Hal ini terlihat dalam kerja sama antara India dan AS, dalam kerangka Quad. Dalam konteks ini, Sri Lanka menjadi indikator bagaimana persaingan geopolitik akan berkembang di Samudra Hindia.

Mengamati tiga aspek - ekonomi, kedaulatan, dan keamanan regional - memungkinkan kita memahami implikasi BRI terhadap keamanan tradisional di Asia Selatan dengan lebih baik, terutama melalui kasus Sri Lanka. Dari sudut pandang Neorealis, kasus Hambantota menunjukkan bahwa dalam sistem internasional, kekuatan besar akan selalu mencari cara untuk meningkatkan kekuatan relatif mereka terhadap negara-negara lain, dan BRI adalah salah satu cara yang canggih untuk mencapai tujuan tersebut.

Namun, analisis ini juga menunjukkan bahwa perdebatan populer tentang diplomasi jebakan utang BRI sering kali mengabaikan kompleksitas masalahnya. Sebagaimana disampaikan oleh Hameiri dan Jones dalam kajian mereka, bukti yang ada tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa Tiongkok secara sistematis menggunakan pinjaman BRI sebagai “jebakan” untuk mengambil alih aset strategis dari negara-negara debitur. Kasus Sri Lanka, yang sering disebut sebagai contoh paling representatif dari DTD, sebenarnya mencerminkan kombinasi dari kegagalan tata kelola domestik, kelalaian fiskal, dan tekanan ekonomi eksternal, bukan semata-mata hasil manipulasi strategis oleh Tiongkok. Krisis utang Sri Lanka tahun 2016 disebabkan oleh pinjaman komersial berbunga tinggi yang tidak bijaksana serta pinjaman dari Tiongkok.

Mengakui kompleksitas kausal ini tidak berarti meniadakan realitas geopolitik yang ada. Terlepas dari apakah sewa Hambantota merupakan hasil jebakan yang disengaja atau tidak, fakta bahwa sebuah perusahaan milik negara Tiongkok kini mengelola fasilitas pelabuhan strategis di tengah Samudra Hindia di bawah sewa 99 tahun tetaplah sama. Dan fakta inilah yang membentuk perhitungan keamanan semua aktor regional. Dalam kerangka keamanan tradisional, penentu perilaku negara adalah persepsi ancaman, bukan niat sebenarnya dari ancaman yang dirasakan.

Oleh karena itu, terlepas dari penjelasan kausal tentang bagaimana Tiongkok mengamankan pengelolaan Hambantota, implikasi keamanannya bagi India dan stabilitas kawasan Asia Selatan tetap signifikan dan tidak dapat diabaikan. Hal ini mengarah pada paradoks analitis mendasar: BRI secara bersamaan merupakan instrumen pembangunan yang sah dan instrumen proyeksi kekuatan potensial. Dualitas ini mencerminkan ambiguitas yang melekat pada konsep tata kelola ekonomi negara, di mana tindakan-tindakan yang secara individual tampak netral secara komersial, secara kolektif dapat menciptakan struktur ketergantungan dan pergeseran kekuasaan yang memiliki konsekuensi keamanan yang mendalam.

Kasus Sri Lanka juga memberikan pelajaran penting bagi negara-negara berkembang lainnya yang berada dalam situasi serupa. Krisis ekonomi yang memuncak pada gagal bayar utang pada April 2022 menunjukkan bahwa erosi kedaulatan dan keamanan tradisional tidak selalu berasal dari ancaman militer langsung. Di era modern, ancaman paling berbahaya sering kali berwujud dalam bentuk ketergantungan ekonomi struktural, yang membuat negara-negara kecil tidak mampu mempertahankan otonomi strategis mereka. Ancaman ekonomi yang awalnya tampak tidak berbahaya dapat berubah menjadi ancaman keamanan eksistensial terhadap kedaulatan suatu negara.

Secara teoritis, fenomena ini menggarisbawahi bahwa batas antara "*low politics*" (ekonomi, pembangunan) dan "*high politics*" (keamanan, kedaulatan) dalam hubungan internasional kontemporer semakin kabur dan tidak dapat dipertahankan. BRI, sebagai instrumen kebijakan ekonomi Tiongkok, telah menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang secara formal bersifat komersial dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan geopolitik yang sebelumnya hanya dapat dicapai

melalui instrumen militer tradisional. Dalam hal ini, BRI mewakili pergeseran paradigma dalam cara kekuatan besar memproyeksikan kekuatan mereka dan mengejar kepentingan nasional mereka di panggung global.

Akhirnya, kasus Sri Lanka dan Pelabuhan Hambantota menunjukkan bahwa kedaulatan suatu negara di abad ke-21 tidak lagi hanya dipertaruhkan dalam konteks perang atau juga di forum perdamaian. Kedaulatan juga sering dipertaruhkan di setiap meja perundingan ekonomi. Dalam setiap klausul perjanjian pinjaman, kedaulatan negara menjadi taruhan. Bahkan dalam setiap proyek infrastruktur skala besar, kekuatan-kekuatan besar dengan agenda strategis yang lebih besar dari nilai ekonomi proyek itu sendiri turut bermain. Kedaulatan sebuah negara memang sering menjadi taruhan di berbagai kesempatan. Bagi Sri Lanka, pelajaran ini datang dengan harga yang sangat mahal. Negara ini mengalami krisis ekonomi terburuk sejak merdeka pada 1948. Selain itu, Sri Lanka juga mengalami penurunan dalam otonomi strategis. Otonomi ini telah dipertahankan dengan susah payah selama beberapa dekade.

SIMPULAN

Tragedi Pelabuhan Hambantota menjadi acuan bahwa satu negara dapat diakuisisi oleh negara lain melalui *Debt Trap Diplomacy.* Hal ini yang menunjukkan hilangnya kedaulatan nasional dan lemahnya kepentingan negara yang terdampak. Melalui teori keamanan tradisional, dapat dilihat melalui pandangan neo-realisme klasik, dimana sebuah negara menjadikan keamanan sebagai suatu citra tertinggi. Jika sebuah infrastruktur yang penting diambil ahli olehftif negara lain, maka citra negara tersebut hilang. Melalui kasus ini, dapat diperlihatkan bahwa negara yang memiliki *power* cenderung memanfaatkan instrumen ekonomi sebagai alat *economic statecraft* untuk memperluas jangkauan strategisnya atas wilayah negara yang lebih lemah, sebagaimana terlihat dalam akuisisi Pelabuhan Hambantota oleh Tiongkok.

REFERENSI

(n.d.). *Hubungan Bilateral China dan Sri Lanka*, 9.

Ajnoti, R. (2022). *The Complete Story of Debt-Trap Diplomacy*. Retrieved from https://thegeopolitics.com/the-complete-story-of-debt-trap-diplomacy/

Akbar, I. (2024). *KONFLIK INDIA-PAKISTAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEAMANAN DI WILAYAH KASHMIR MELALUI PERSPEKTIF NEOREALISME*, 74.

Ananda, R. (2023). *Pengaruh Kerja Sama Tiongkok dan Sri Lanka dalam Pembangunan Hambantota terhadap Perekonomian Sri Lanka 2014-2017*, 3.

Ariyawardana, S. N. (2022). *The Implications of China's Belt and Road Initiative (BRI) On Sri Lanka In The Future*, 16.

Baldwin, D. (2020). Retrieved from Economic Statecraft: https://www.britannica.com/topic/economic-statecraft.

Elvira Nuraini, E. C. (2025). *MANIFESTASI ECONOMIC STATECRAFT CHINA DALAM PROYEK*, 66-67.

FRATIWI, V. (2025). *KEBIJAKAN PERDAGANGAN TIONGKOK DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN DOLAR AS PADA PERANG DAGANG*, 92.

Ghiretti, F. (2025). *The Return of Economic Statecraft*. Retrieved from https://www.rand.org/pubs/commentary/2025/10/the-return-of-economic-statecraft.html

Gopaldas, R. (2018, February). *Lessons from Sri Lanka on China's 'debt-trap diplomacy.* Retrieved from https://issafrica.org/iss-today/lessons-from-sri-lanka-on-chinas-debt-trap-diplomacy#:~:text=It%20is%20important%20to%20recap,a%20straightjacket%20of%20debt%20servitude.

Hasanah, & dkk. (2022). *Krisis Utang Sri Lanka dalam Kerja Sama Pembangunan*, 5.

Imawan, I. I., & dkk. (2025). *Krisis Utang Global di Tengah Ketegangan Geopolitik: Memetakan Ketimpangan Ekonomi Negara Berkembang dengan Clustering Machine Learning*, 198.

IMF. (2025). *Sri Lanka's Sovereign Debt Restructuring: Lessons from Complex Processes.* International Monetary Fund.

Institute, P. S. (2024). *Traditional National Security: Protecting Territorial Integrity • PolSci Institute*. Retrieved from https://polsci.institute/global-politics/traditional-national-security-territorial-integrity/

Justice, C. f. (2024). *The Silk Road's Burden: Sri Lanka's Journey through Chinese Debt*, 3. Retrieved May Friday, 2026, from https://www.urgewald.org/sites/default/files/media-files/Sri_Lanka_Chinese_Debt.pdf

KALLIO, J. (2022). *CHINA'S BELT AND ROAD INITIATIVE SUCCESSFUL ECONOMIC STRATEGY OR FAILED SOFT-POWER TOOL?*

Lakshmi, A. (2021). *Chinese Debt Trap Diplomacy in Hambantota: Implications.* Retrieved from CLAWS: https://claws.co.in/chinese-debt-trap-diplomacy-in-hambantota-implications/

MIAP. (2026). *Hambantota Port Rises as Strategic Hub amid Gulf Conflict - LNW Lanka News Web*. Retrieved from https://lankanewsweb.net/archives/188591/hambantota-port-rises-as-strategic-hub-amid-gulf-conflict/

Ryo Sahashi, Y. M. (2024). *Asia Rising.* Tokyo.

Saraswati, N. M. (2019). *Menilik Perjanjian Indonesia-Cina dalam Kerangka Belt*, 56.

Sulistiyawan, E., & dkk. (2024). *PENGARUH PASAR CINA TERHADAP EKONOMI GLOBAL*, 2.

Waltz, K. (1979). *Theories of International Politics.*

WANG. (2021). Retrieved from About the Belt and Road Initiative (BRI): https://greenfdc.org/belt-and-road-initiative-about/.

Amaritasari, I. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. *Jurnal Keamanan Nasional*, *1*(2), 153–174. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i2.21

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). *No Title 済無No Title No Title No Title*. *2*, 306–312.

Amineh, M. P., & Li, S. (2025). The structural challenges of transnationalizing the China-led BRI: The case of Pakistan. *Journal of Developing Societies.* https://doi.org/10.1177/0169796X251369694

Anam, S., & Ristiyani, R. (2021). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada masa pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 17*(1). https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842

Hameiri, S., & Jones, L. (2024). China, international competition and the stalemate in sovereign debt restructuring: Beyond geopolitics. *International Affairs, 100*(2), 691–710. https://doi.org/10.1093/ia/iiae017

Himmer, M., et al. (2023). Chinese debt trap diplomacy: Reality or myth? *East Asia: An International Quarterly, 40*, 250–272. https://doi.org/10.1080/19480881.2023.2195280

Kandaudahewa, H. (2023). Sri Lanka's strategic dilemma. *Journal of Indo-Pacific Affairs.* https://media.defense.gov/2023/Sep/21/2003305661/-1/-1/1/JIPA%20-%20KANDAUDAHEWA.PDF

Kostecka-Tomaszewska, L., & Krukowska, M. (2021). China's economic statecraft: The role of the Belt and Road Initiative. *European Research Studies Journal, 24*(2). https://ersj.eu/journal/2170

Mahendra, Y. I., Ramadhoan, R. I., & Suhermanto, D. F. (2023). Pengaruh kebijakan Belt and Road Initiative Tiongkok terhadap stabilitas sub-kompleks keamanan Asia Tenggara. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 19*(2). https://doi.org/10.26593/jihi.v19i2.5788

Mallick, S. (2024). China's Belt and Road Initiative: Impact on South Asia's geopolitical landscape and regional dynamics. *South Asian Survey.* https://doi.org/10.1177/09735984251327850

Moramudali, U., & Panduwawala, T. (2024). The political economy of Hambantota Port: Unveiling the realities of debt trap diplomacy and BRI vision. *Asian Journal of Political Science, 32*(3), 380–399. https://doi.org/10.1080/02185377.2024.2424758

SAIS Review of International Affairs. (2025). How sovereign debt crises are becoming geopolitical: Lessons from Sri Lanka. Johns Hopkins University. *https://saisreview.sais.jhu.edu/how-sovereign-debt-crises-are-becoming-geopolitical-lessons-from-sri-lanka/*

United States Institute of Peace (USIP). (2023). Does China's coercive economic statecraft actually work? *https://www.usip.org/publications/2023/03/does-chinas-coercive-economic-statecraft-actually-work*

Vivekananda International Foundation. (2022). China's debt trap diplomacy in Sri Lanka. *https://www.vifindia.org/article/2022/july/30/china-s-debt-trap-diplomacy-in-sri-Lanka*